



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640

www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 61/DJU/UND.DL1.10/III/2025 Jakarta, 10 Maret 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Undangan Menghadiri Rapat
Koordinasi Secara Online

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

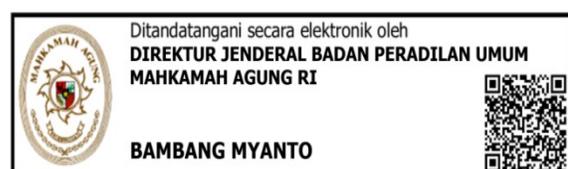
Menindaklanjuti Memorandum Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. Nomor 28/KM.PID/M.10/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 hal permohonan Menugaskan Pegawai untuk Menghadiri Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Memperhatikan Penilaian Resiko (*Risk Based Approach*), bersama ini kami minta Saudara untuk dapat menunjuk 2 (dua) orang perwakilan Hakim pada satuan kerja Saudara untuk menghadiri rapat koordinasi tersebut secara online yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d selesai (susunan acara terlampir)
Link Zoom : <https://bit.ly/RakorEfektivitasPenangananPerkaraTPPU>

ID Rapat : 89415609744
Kode Sandi : 622191

Untuk konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui link <https://bit.ly/KonfirmasiFGD-Virtual> paling lambat Senin, 10 Maret 2025, lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Cindyana Gunawan 08119223838 atau Sdri. Riana Rizka 085760895678.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial di Jakarta.
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung R.I. di Jakarta.





PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Telepon +6221-3850455, Faksimili +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Nomor : T/64/DN.01/4.1/III/2025 Jakarta, 7 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Menugaskan Pegawai untuk Menghadiri Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Memperhatikan Penilaian Risiko (*Risk Based Approach*)

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di tempat

Dasar:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai wujud komitmen Pemerintah dalam penguatan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), PPATK bersama dengan *stakeholders* rezim anti pencucian uang telah menerbitkan dokumen penilaian risiko nasional terhadap TPPU 2021 (*National Risk Assessment on Money Laundering/NRA on ML*) yang didasarkan atas kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Hasil NRA 2021 menunjukkan bahwa kejahatan TPPU berasal dari Tindak Pidana Korupsi, Narkotika, Penipuan melalui Transfer Dana maupun pemanfaatan Informasi Transaksi Elektronik (ITE) atau SIBER, merupakan tindak pidana asal yang berisiko tinggi terhadap TPPU. Area berisiko tinggi tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dan komitmen yang kuat dari pemerintah sebagaimana program prioritas Bapak Presiden Republik Indonesia pada Asta Cita 7 yang telah dicanangkan.

Besarnya nilai aset yang terkait dengan kejahatan tersebut merupakan daya tarik bagi pelaku kejahatan sekaligus juga merupakan titik lemah yang dapat diekspose oleh penegak hukum. Oleh karena itu, pendekatan *follow the money* merupakan keharusan sebagai pelengkap dalam penanganan perkara tindak pidana. Di Indonesia, perampasan aset dalam kasus TPPU diatur dalam berbagai regulasi. Namun dalam pelaksanaannya perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas pembuktian, penyembunyian aset melalui jaringan internasional, serta kendala regulasi dan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, institusi keuangan, dan otoritas terkait untuk memastikan



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dan Beta Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Beta Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA

efektivitas mekanisme ini dalam memberantas TPPU serta mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat menugaskan **2 (dua) orang perwakilan hakim pada seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Indonesia** untuk hadir secara **online (virtual)** dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Memperhatikan Penilaian Risiko (*Risk Based Approach*) yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai (sesuai susunan acara terlampir)
Link Zoom : <https://bit.ly/RakorEfektivitasPenangananPerkaraTPPU>
ID Rapat : 894 1560 9744
Kode Sandi: 622191

Untuk konfirmasi kehadiran mohon dapat disampaikan melalui link berikut <https://bit.ly/KonfirmasiFGD-Virtual> paling lambat **Senin, 10 Maret 2025**. Apabila diperlukan koordinasi dan konfirmasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Cinyana Gunawan (HP: 0811-9223-838) atau Sdri. Riana Rizka (HP: 0857-6089-5678).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala PPATK



Ivan Yustiavandana

Tembusan:

Yth. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung.



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA

Lampiran I

Nomor : T/64/DN.01/4.1/III/2025

Tanggal : 7 Maret 2025

AGENDA KEGIATAN

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30 - 09.00	Registrasi Kehadiran	Panitia
09.00 - 09.05	Pembukaan MC	MC
09.05 - 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia & Paduan Suara
09.10 - 09.15	Menyanyikan Mars PPAK	Panitia & Paduan Suara
09.15 - 09.20	Pembacaan Doa	Panitia
09.20 - 09.40	Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala PPAK	Bapak Ivan Yustiavandana
09.40 - 09.50	Penyerahan Plakat/Cinderamata, Penyerahan Pin Gernas 23 tahun APUPPT dan Foto Bersama	Panitia
09.50 - 10.00	Tayangan Video	Panitia
10.00 - 11.00	Panel Diskusi I : Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Memperhatikan Penilaian Risiko (<i>Risk Based Approach</i>)	Moderator: Prita Laura Panelis 1: Bapak Dr. H. Prim Haryadi, S.H., M.H (30') Panelis 2: Bapak Prof. Dr. Asep Nana Mulyana (30')
11.00 - 11.30	Diskusi & Tanya Jawab Panel I	Moderator
11.30 - 12.10	Panel Diskusi II (Lanjutan) : Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian	Moderator: Prita Laura Panelis 3: Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M (20')



	Uang Dengan Memperhatikan Penilaian Risiko <i>(Risk Based Approach)</i>	Panelis 4: Bapak Muhammad Novian (20')
12.10 – 12.30	Diskusi & Tanya Jawab Panel II	Moderator
12.30 – 12.45	<i>Wrap Up</i> dan Rencana Tindak Lanjut oleh Direktur Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri	Bapak Moh. Irhamni
12.45 – 12.50	Penutup	MC

